

PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS TERPADU DI KABUPATEN PONOROGO

Istijabatul Aliyah¹, Rara Sugiarti²

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Abstract

This study aims to formulate strategies to develop integrated specific zone in Ponorogo regency. This research employed qualitative approach. Data were collected using several techniques including site observation, document study, and interview. This research used interactive analysis. Results indicate that the area needs integrated zone planning to develop regional resources to facilitate various activities which intend to perform healthy and prosperous community of the Ponorogo regency. The result of the study is expected to become one of guides to develop integrated specific zone in Ponorogo regency. Conceptually, the integrated specific zone can be used as a landscape in order that the area can be projected as a town forest with the following land use, 10% as main entrance, 60% as conservation area, 10% as economic zone, and 20% as socio-cultural area. Similarly, the area which is planned to be specific zone has main theme as the town forest zone to support the ecology. The plan to use the land in the integrated specific zone includes the function to be the main entrance zone and the reception area, the conservation zone, the economic zone, and the activities zone.

Keywords: Integrated Zone, Planning, Specific Zone.

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan di berbagai bidang telah menimbulkan dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, pembangunan dapat membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Namun, di sisi lain banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan di berbagai bidang tersebut. Perkembangan pesat industri kendaraan bermotor, misalnya, telah menyebabkan bertumpuknya karbondioksida yang diakibatkan oleh pengolahan bahan bakar berbagai jenis kendaraan bermotor sehingga membuat udara kota/desa menjadi kotor. Di samping itu jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat juga telah menyebabkan kemacetan dan kebisingan di daerah perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat berusaha mengikuti arus pembangunan dengan mengerahkan segala upaya agar tidak terlindas oleh roda pembangunan yang bergerak cepat. Kehidupan sehari-hari mereka senantiasa dipenuhi dengan rutinitas yang menuntut mereka untuk bekerja keras. Sementara hal-hal tersebut dapat menyebabkan kelelahan jiwa yang berbahaya bagi kestabilan kehidupan serta kondisi kesehatan masyarakat. Masyarakat memerlukan keseimbangan untuk menciptakan keharmonisan. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan kehidupannya dengan menyediakan suatu kawasan yang berfungsi ganda yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan jiwa dan raga masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo memiliki kawasan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat guna menyeimbangkan kebutuhan jiwa dan raga. Kawasan tersebut merupakan suatu kawasan khusus yang memiliki multi fungsi dan merupakan kawasan terpadu yang dikembangkan dalam suatu lokasi. Fungsi kawasan khusus terpadu tersebut meliputi fungsi ekologi, edukasi, ekonomi, rekreasi, olah raga dan kesehatan, konservasi serta fungsi lainnya secara terintegrasi dalam suatu kawasan dan bersifat saling mendukung. Beberapa aset pemerintah yang masih belum dikelola atau digunakan secara optimal salah satunya adalah tanah yang berada di bagian utara Kabupaten Ponorogo yaitu tanah bengkok yang sekarang dibawah pengelola Kantor Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Dalam perkembangan dewasa ini, pembangunan di Kabupaten Ponorogo pesat dilakukan. Sarana rekreasi, edukasi dan ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus ditingkatkan. dengan memanfaatkan area yang berada di perbatasan Kelurahan Cokromenggalan dan Kelurahan Babadan, dan berada di pinggir jalan utama Ponorogo-Madiun, area ini digunakan sebagai Kawasan Khusus Terpadu.

Kawasan khusus terpadu yang dimaksud adalah kawasan yang memiliki kegiatan khusus seperti rekreasi, olah raga dan edukasi yang dipadukan secara sinergis dan ditata sebagai perwujudan ruang terbuka hijau. Mengingat pentingnya saran ini untuk masyarakat

Kabupaten Ponorogo, maka perlu dibuat suatu acuan rancangan dalam bentuk Master Plan Kawasan Khusus Terpadu di Kabupaten Ponorogo.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kawasan

Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta seluruh unsur terkait yang terdapat di dalamnya dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (Sirait, 2009). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dengan mengacu pada peristilahan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang maka istilah kawasan juga memiliki pengertian sebagai wilayah.

Menurut Rustiadi, et.al (2006) dalam Damandiri (2009) wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Dengan demikian batasan wilayah tidak selalu bersifat fisik dan pasti atau kaku, melainkan seringkali bersifat dinamis.

Adapun komponen-komponen fisik wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan (infrastruktur), sumber daya manusia, serta bentuk-bentuk kelembagaan. Sehingga istilah wilayah menekankan interaksi antara manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Dalam konsep yang paling klasik wilayah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni: 1) wilayah homogen, 2) wilayah nodal, dan 3) wilayah perencanaan (Hagget, 1977 dalam Damandiri, 2009). Sedangkan Glason, 1974 dalam Damandiri (2009) membuat klasifikasi wilayah berdasarkan fase kemajuan perekonomian. Dalam hal ini wilayah dikategorikan menjadi tiga fase, yakni: 1) fase pertama, yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas; wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial, dan politik; 2) fase kedua, yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Wilayah ini juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri atas satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan; 3) fase ketiga yaitu wilayah peencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

2. Kawasan Khusus

Menurut Solihin (2009) kawasan khusus adalah kawasan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus. Berdasarkan

batasan tersebut maka dapat disusun batasan untuk kawasan khusus lainnya yang tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi pemerintahan, namun mewadahi fungsi-fungsi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Pengembangan suatu kawasan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat ruang yang terdapat di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan perlu diawali dengan pemetaan yang dilakukan untuk mewujudkan *strategic development region* di mana satu wilayah atau kawasan pengembangan perlu dikaji keseluruhan unsur yang harus dimiliki, yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur (sumber daya buatan) yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme diantaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003 dalam Damandiri, 2009).

3. Kawasan Terpadu

Kawasan terpadu (*integrated area*) dapat diartikan sebagai kawasan yang memiliki multi fungsi dimana satu fungsi dengan fungsi lainnya memiliki sifat saling mendukung, mengisi, dan melengkapi sehingga tercipta optimalisasi masing-masing fungsi dari kawasan tersebut. Istilah terpadu dalam pengembangan kawasan secara terpadu dapat diterjemahkan ke dalam beberapa konteks. Terpadu berarti terdapat sinkronisasi dalam mengembangkan suatu kawasan, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengembangan,

pengelolaan, pemantauan, dan penilaian atas optimalisasi masing-masing fungsi dalam kawasan tersebut dalam satu kesatuan organisasi ruang. Terpadu juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kawasan dengan memadukan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam menyusun perencanaan pengembangan agar tujuan pengembangan kawasan tersebut dapat tercapai. Unsur pemangku kepentingan terdiri atas pemerintah, swasta dan masyarakat yang diharapkan dapat bersinergi untuk bersama-sama mendukung pengembangan suatu kawasan. Keterpaduan antara seluruh pemangku kepentingan tersebut diharapkan juga tercermin dalam setiap tahapan pengembangan kawasan, mulai dari tahap perencanaan samapi dengan tahap penilaian atas keberhasilan pengembangan kawasan tersebut.

Dalam konteks penyusunan master plan kawasan khusus terpadu di Kabupaten Ponorogo kawasan terpadu diartikan sebagai kawasan yang akan dikembangkan untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk melakukan kegiatan rekreasi, edukasi, dan olah raga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sehat jasmani dan rokhani.

4. Kawasan Khusus Terpadu

Dalam konteks penyusunan master plan kawasan khusus terpadu di Kabupaten Ponorogo kawasan khusus mengacu kepada upaya pemanfaatan ruang di wilayah tersebut untuk kepentingan khusus, yakni memberikan fasilitasi kepada masyarakat Kabupaeten Ponorogo untuk melakukan kegiatan

yang berkaitan dengan rekreasi, edukasi, dan olah raga untuk membangun kesehatan jiwa dan raga. Untuk mewujudkan masyarakat Ponorogo yang sehat jasmani dan rohani. Sedangkan istilah terpadu mengacu kepada upaya menciptakan struktur ruang yang mengakomodasi beberapa fungsi termasuk fungsi ekologi, ekonomi, rekreasi, dan kesehatan dalam satu kawasan yang memiliki entitas fungsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, daerah yang memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan secara optimal guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sumber data yang dikaji berupa informan, tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen terkait. Dalam hal ini informan terdiri atas unsur swasta, masyarakat serta pemerintah, termasuk pejabat dari berbagai dinas atau instansi terkait di Kabupaten Ponorogo, yang memiliki kapasitas dalam merencanakan pengembangan kawasan khusus terintegrasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi lapangan (pengamatan langsung), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan metode simak atau *existing document study*. Agar setiap informasi yang digali dari observasi, wawancara, dan metode simak dapat tercatat dengan baik dan lengkap digunakan alat perekam berupa catatan lapangan (*field note*), alat perekam suara (*digital voice recorder*)

dan kamera untuk membantu tersajinya kelengkapan data.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984). Teknik analisis interaktif memiliki tiga komponen utama, yakni reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Reduksi Data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Data dari lapangan yang berupa hasil wawancara atau rangkuman data sekunder yang kemudian direduksi dan dipilih hal yang menonjol. Dengan melakukan reduksi data, peneliti akan memperoleh data yang akurat, karena peneliti dapat mengecek apakah adakah data penelitian yang sama dengan yang diperoleh sebelumnya, sehingga dapat menghindari adanya ketumpangtindihan. Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi dalam bentuk klasifikasi atau kategorisasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dalam hal ini *display* meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan, dan tabel yang terkait. Penarikan Kesimpulan merupakan suatu pengorganisasian data yang telah terkumpul sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan akhir penelitian. Dalam awal pengumpulan data, peneliti berusaha memahami keteraturan, pola, pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi. Peneliti bersikap terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir baru dapat dibuat

apabila seluruh proses pengumpulan data berakhir.

HASIL PENATAAN

1. Gambaran Kondisi Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah 1.371,78 kilometer persegi. Wilayah ini terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 di atas permukaan laut. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan: Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk di sebelah utara; di sebelah Timur dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan, dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah). Jarak Ibukota Ponorogo dengan Ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 Km arah Timur Laut, dan ke Ibukota negara (Jakarta) sekitar 800 Km ke arah Barat.

Secara geografis Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung, serta Ngebel. Sisanya merupakan dataran rendah (Kecamatan Nrayun, Slahung, Bungkul, Sambit, Sawoo, Pudak, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, Jenangan). Sungai yang melewati daerah ini sebanyak 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 kilometer. Sungai-sungai ini menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian untuk produksi padi dan hortikultura.

2. Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Ponorogo

1) Keterkaitan Kawasan terhadap Konstelasi Wilayah

Kawasan Khusus Terpadu yang dialokasi pada wilayah perbatasan antara Kelurahan Cokromenggalan dan Kelurahan Babadan merupakan bagian dari wilayah pengembangan Kabupaten Ponorogo. Dengan menyebarnya lokasi wisata, edukasi dan kesehatan yang berbasis ekologi di wilayah perkotaan Ponorogo maka diharapkan sektor wisata mampu mendukung perkembangan perekonomian wilayah dengan asumsi bahwa obyek wisata akan mendatangkan wisatawan, dan juga karena sektor wisata adalah salah satu aspek pendapatan dari perekonomian daerah.

Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Ponorogo tersebar di beberapa titik berdasarkan potensi dasarnya, antara lain:

- a. Potensi wisata alam (ecotourism) berada di Kecamatan Pudak,
- b. Urbantourism dan culturetourism berada di Kecamatan Ponorogo dengan atraksi belanja dan kesenian reog, grebeg Suro dan taman singo pitu, serta
- c. Agrotourism berada di Kecamatan Ngebel yang berada di sekitar Telaga Ngebel dengan komoditas unggulan pertanian dan perikanan darat.

2) Kebijakan Pemanfaatan Ruang Lingkup Kabupaten Ponorogo.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Ponorogo yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Kondisi fisiografi Kabupaten Ponorogo sangat mempengaruhi dalam pengembangan kawasan lindung serta budidaya yang ada. Secara fisiografi di Kabupaten Ponorogo menunjukkan adanya perbukitan bergelombang dan pegunungan yang merupakan lereng Gunung Wilis.

3) Kebijakan Struktur Ruang

Lingkup Kabupaten Ponorogo

Rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Ponorogo dilihat dari penetapan kawasan perdesaan dan penetapan kawasan perdesaan berdasarkan kondisi, kelengkapan fasilitas dan karakteristik kegiatan yang terdapat pada setiap kecamatan sehingga dapat ditetapkan kawasan perdesaan dan kawasan perdesaannya. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan tanah dan ruangnya. Kriteria penetapan batas kota di wilayah Kabupaten Ponorogo ditetapkan atas dasar status kawasan sebagai kawasan perkotaan ibu kota kecamatan; khusus untuk Perkotaan Ponorogo wilayahnya meliputi seluruh administratif kecamatan

dengan status sebagai ibukota Kabupaten Ponorogo.

3. Identifikasi Isu Dan Permasalahan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan khusus terpadu di Kabupaten Ponorogo antara lain adalah lokasi kawasan yang berdekatan dan bahkan berbatasan secara langsung dengan lokasi industri (keberadaan pabrik dan pusat pengolahan aspal). Keberadaan pabrik merupakan hal yang tidak mendukung terbentuknya suasana kondusif dalam pengembangan kawasan khusus terpadu yang akan diperuntukkan bagi wahana mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan rekreasi, edukasi, dan olah raga. Dengan adanya beberapa pabrik yang terdapat di sekitar lokasi kawasan khusus terpadu yang akan dikembangkan maka tercipta kesan *crowded* dan bising karena banyaknya kendaraan, khususnya kendaraan besar seperti *truck*, yang berlalu lalang di sekitar kawasan untuk melakukan bongkar muat barang-barang kebutuhan dan produksi pabrik. Hal ini tentu saja akan sangat mengganggu kenyamanan pengguna kawasan khusus terpadu.

Di samping keberadaan beberapa pabrik di sekitar lokasi kawasan khusus terpadu, juga terdapat permasalahan lain yaitu adanya jalan yang membelah kawasan, dan jalan tersebut merupakan jalan permanen yang bahkan telah dilengkapi dengan jalur PLN yang permanen menuju ke beberapa desa yang terdapat di sekitar kawasan khusus terpadu. Di samping merupakan jalan yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menuju ke desa-desa lain di sekitar

kawasan khusus terpadu, jalan yang membelah kawasan tersebut juga merupakan akses bagi kendaraan besar yang berlalu lalang dari dan ke pabrik-pabrik yang berada di sekitar kawasan. Dengan adanya jalan permanen yang membelah kawasan khusus terpadu tersebut, maka keterpaduan kawasan secara fisik akan sulit diwujudkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis kawasan perencanaan atau kawasan khusus terpadu dilakukan untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi input dalam menentukan konsep atau arahan rencana yang akan disusun. Analisis kawasan perencanaan ini juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk dapat mengetahui kondisi dari suatu kawasan berdasarkan hasil olahan melalui kajian yang lebih mendalam sehingga diperoleh suatu gambaran kawasan yang menunjukkan suatu keterkaitan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Dalam analisis kawasan perencanaan yang akan dilakukan untuk penyusunan dokumen Masterplan Kawasan Khusus Terpadu antara lain analisis pola pemanfaatan ruang, analisis struktur pemanfaatan ruang, analisis fisik kawasan, analisis isu dan permasalahan kawasan.

1. Analisis Keterkaitan Kawasan Dalam Konstelasi Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kawasan Perencanaan merupakan tanah bengkok desa Citromenggalan berada pada sisi utara Kecamatan Ponorogo berbatasan dengan Kecamatan Babadan. Ciri atau

karakteristik kawasan perencanaan dan sekitarnya saat ini adalah area campuran diantaranya persawahan dan tegalan (pertanian), area hutan, perumahan serta industri dengan dominasi oleh kegiatan pertanian dan industri.

Tata letak dan kedudukan geografis kawasan perencanaan yang berada di tepi ruas jalan regional Ponorogo Madiun maka dalam konstelasi Kabupaten Ponorogo lokasi perencanaan berada pada posisi strategis yang sangat potensial untuk dikembangkan.

1) Fungsi Kawasan Perencanaan dalam Perkembangan Kota.

Tumbuh dan berkembangnya serta karakteristik yang terbentuk dalam suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang akan di kembangkan dalam kawasan tersebut. Kawasan Perencanaan yang saat ini merupakan kawasan campuran, kedepan akan dikembangkan sebagai kawasan penyangga ekologis untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan pada kawasan maupun kota. Kedudukan kawasan perencanaan yang terletak diarea pinggiran namun secara fungsional dekat dengan pusat kota mempunyai nilai lahan yang semakin tinggi, hal ini sesuai teori dari Von Thunnen yang mengatakan :” Bahwa semakin dekat dengan pusat kota, nilai lahan semakin mahal” adalah benar. Hal ini ditunjang pula adanya prasarana jalan yang mendukung dari area perencanaan berada pada ruas jalan regional Ponorogo-Madiun.

Kondisi ini menjadi dilema dalam pengembangan kawasan yang sesuai antara maksud pengembangan

kawasan penyangga dengan kondisi obyektif dari kawasan yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Oleh karena itu untuk mencapai optimalisasi dari berbagai aspek, maka pengembangan kawasan selain peran ekologis perlu juga mempertimbangkan peran sosial, ekonomi budaya .

2) Fungsi Kawasan sebagai Kawasan Khusus Terpadu.

Pengembangan area perencanaan sebagai Kawasan Khusus terpadu harus mempunyai cakupan antara lain :

- a. sebagai fungsi penyangga yang mempunyai peran ekologis
- b. Sebagai fungsi sosial mempunyai peran wahana interaksi berbagai komponen masyarakat.
- c. sebagai fungsi ekonomi mempunyai peran mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.
- d. sebagai fungsi budaya mampu menjadi sarana mengekspresikan potensi kesenian masyarakat.

Unsur–unsur dari keempat fungsi ekologi, sosial ,ekonomi dan budaya akan mendasari konsep pengembangan kawasan dengan peran dominan sebagai fungsi ekologis dengan didukung fungsi yang lain sebagai kesatuan yang saling mendukung.

2. Analisis Pemanfatan Ruang Lingkup Kabupaten

Sesuai dengan peran dan fungsi kawasan bagi Kabupaten Ponorogo, kawasan perencanaan (sebagai salah satu pusat pelayanan skala Kota sampai dengan regional) direncanakan untuk dikembangkan dengan fungsi utama ruang terbuka hijau, rekreasi, kesehatan dan edukatif. Kegiatan kesehatan dan edukatif, diarahkan sebagai bagian rekreasi yang bernuansa kesehatan dan pendidikan. Sedangkan ruang terbuka hijau menjadi fungsi utama kawasan dengan konsep pelestarian ekologi.

Analisis pola pemanfaatan ruang merupakan analisis terkait kondisi penggunaan lahan yang terdapat pada Kawasan Khusus Terpadu Kabupaten Ponorogo. Analisis pola pemanfaatan ruang akan menunjukkan kesatuan sistem penggunaan lahan di kawasan tersebut baik dilihat dari peruntukan lahan makro maupun peruntukan lahan mikro. Tujuan dari analisis pola pemanfaatan ruang adalah untuk mengetahui kondisi tata guna lahan secara eksisting sehingga dapat diketahui potensi dan masalah penggunaan lahan, dengan demikian dapat dilakukan suatu upaya untuk pengarahan pengembangan fungsi lahan agar lebih optimal.

1) Peruntukan Lahan Makro

Kaitan peruntukan lahan pada Kawasan Khusus Terpadu Kabupaten Ponorogo dengan peruntukan lahan kota secara makro selalu saling mempengaruhi bahkan berhubungan erat dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan kota. Peran yang diberikan baik antar kota maupun dengan bagian kota didalamnya dapat memicu perkembangan sektor kegiatan di wilayah yang lebih kecil,

termasuk dalam hal ini adalah kawasan perencanaan yang berada pada sepanjang koridor Jalan Ponorogo-Madiun.

Kesesuaian tingkat dan laju kemampuan perkembangan kota yang akan memberikan arahan dalam pengembangan sektor-sektor kegiatan dan arahan pengembangan kota. Estimasi kebutuhan pengembangan ruang fisik kota dalam hubungannya untuk memberikan gambaran struktur kota pada masa mendatang, agar pengaturan dan intensitas setiap jenis penggunaan lahan kota dapat ditetapkan melalui kebijaksanaan pengaturan dan strategi pengembangan yang ditetapkan. Ruang fisik kota merupakan wadah tersendiri, dengan adanya kaitan hubungan fungsional antar bagian wilayah dalam kota sehingga membentuk satu kesatuan struktur kota, yang mana di dalam pengaturan dan intensitas setiap jenis penggunaan lahan kota dapat mengikuti kebijaksanaan pengaturan dan strategi pengembangan yang ditetapkan.

Perkembangan kawasan perencanaan ini dapat dilihat dari perkembangan sektor kegiatan dimana nantinya berimbas kembali pada perkembangan Kota Ponorogo secara makro. Skala pelayanan wilayah kota terhadap daerah penyangga yang akan memberikan masukan dalam penentuan kesesuaian fungsi dan peranan Kota Ponorogo. Adapun fungsi dan peranan Kota Ponorogo yang diimban sama seperti kota-kota besar pada umumnya yaitu Kota Ponorogo sebagai pusat

kegiatan pemerintahan, Kota Ponorogo berperan primer sebagai pusat pelayanan kegiatan bagi kota-kota disekitarnya dan berperan skunder melayani kegiatan dalam lingkup internal Kota Ponorogo.

Kota Ponorogo atau lebih dikenal dengan nama Bumi Reyog adalah kota budaya dan kerajinan.

Perkembangan pembangunan pada kawasan perencanaan juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari daerah sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat ditimbulkan karena adanya hubungan dan interaksi antara daerah ataupun kota pada sekitar kawasan perencanaan. Hubungan tersebut membentuk suatu struktur kegiatan tersendiri yang menimbulkan adanya daya tarikan maupun bangkitan pada lokasi studi. Tarikan dan bangkitan tersebut berupa guna lahan (yang sangat dipengaruhi oleh guna bangunan) antara lain berupa kelengkapan dari fasilitas penunjang, fasilitas umum, peruntukan lahan untuk sarana rekreasi, edukasi dan ekologi yang ada di sepanjang koridor jalan. Pertumbuhan guna lahan dan guna bangunan tersebut akan mempengaruhi dalam sirkulasi, perkembangan daya dukung lahan, persebaran dari prasarana dan sarana lingkungan (street furniture), penanda jalan.

Hal yang perlu juga diperhatikan adalah jika pertumbuhan tersebut dapat menimbulkan kejenuhan lingkungan yang berdampak pada wilayah sekitar. Didukung juga dengan pertumbuhan guna lahan di luar wilayah tersebut sebagai imbas

dari kemudahan akses tersebut akan menimbulkan degradasi lingkungan. Hal ini perlu melihat kembali kapasitas yang ada sehingga perlu pengaturan dan pengontrolan terhadap akses kendaraan maupun pertumbuhan guna lahan.

Peruntukan lahan makro dalam kajian ini adalah melihat pola penggunaan lahan secara makro kawasan yaitu sistem penggunaan lahan yang berada di sekitar kawasan khusus terpadu. Analisis secara makro ini dimaksudkan agar arahan pengembangan lahan yang akan dilakukan di Kawasan khusus terpadu dapat selaras dengan kondisi pola lahan makro dan dapat sesuai dengan kebutuhan terhadap ruang dari sudut pandang makro. Selain itu dengan melihat pola lahan secara makro, maka dapat diketahui nilai fungsional Kawasan khusus terpadu dilihat dari kawasan-kawasan disekitarnya.

2) Peruntukan Lahan Mikro

Berdasarkan pengamatan lapangan, secara keseluruhan pola pemanfaatan ruang di kawasan perencanaan cenderung didominasi oleh kegiatan perumahan, ruang terbuka hijau (taman), rekreatif dan edukatif. Kiranya hal ini sejalan dengan perencanaan dan penetapan pada studi sebelumnya dan peraturan daerah yang ada, terkait kegiatan tata ruang bahwa kawasan perencanaan sebagai bagian dari Kota Ponorogo yang berada pada jalur strategis.

Jika peruntukan lahan makro melihat posisi kondisi lahan di kawasan perencanaan secara luas (dari kawasan-kawasan disekitarnya),

maka pada analisis peruntukan lahan mikro akan lebih menguraikan pada kondisi tata guna lahan di dalam kawasan khusus terpadu. Maksud dari analisis peruntukan lahan mikro ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi pemanfaatan di dalam kawasan yang akan dikembangkan. Hasil dari analisis ini akan menjadi input dalam memberikan pertimbangan dalam rencana penataan yang lebih detail.

Kawasan perencanaan yang meliputi kawasan sebelah timur jalan Industri dan sebelah barat jalan industri merupakan kawasan yang memiliki pola penataan cukup teratur. Keteraturan pola penataan pada wilayah perencanaan dapat terbentuk karena apabila dilihat dari bentuk persil yang beragam namun masing-masing memiliki luasan persil yang cukup. Keteraturan penataan ini juga dapat dipahami mengingat di sepanjang koridor tersebut tanahnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai aset Pemda, dengan status kepemilikan yang jelas.

Kawasan khusus terpadu yang berada disamping ruas Jalan Ponorogo-Madiun merupakan blok kawasan yang mempunyai struktur keruangan yang jelas serta fungsi kegiatan yang sangat dominan sehingga blok kawasan ini mempunyai karakter cukup kuat menjadi orientasi dari wilayah sekitarnya baik skope kawasan maupun kota. Kawasan perencanaan merupakan bagian dan pusat Kota Ponorogo yang berada pada bagian kawasan Rencana Pengembangan Jalur/Koridor Pariwisata sebagai

gerbang dari arah utara atau Madiun. Wilayah tersebut memiliki fungsi yang sangat penting bagi aktivitas di Kota Ponorogo yaitu sebagai ikon pintu masuk dan keluar dari dan keluar daerah.

Namun pada masing-masing ruas jalan terdapat fungsi tersendiri sebagai salah satu fungsi yang paling mendominasi atau paling menonjol adalah Bangunan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun bangunan jasa merata tersebar di sekitar kawasan perencanaan dengan bermacam-macam ketinggian, warna, luas persil bangunan dan tanah.

Analisa tata guna lahan ini diperoleh dengan cara membandingkan penggunaan lahan di kawasan perencanaan pada kondisi sesungguhnya dengan ketentuan yang sudah ada. Dalam hal ini ketentuan yang dijadikan pedoman dalam membandingkan peruntukan lahan di kawasan perencanaan adalah RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2030. Perubahan peruntukkan lahan pada kawasan studi lebih dipengaruhi oleh guna bangunan. Guna bangunan ini mempengaruhi dalam peruntukkan guna lahan yang ada di kawasan ataupun sekitar kawasan.

3. Analisis Struktur Pemanfaatan Ruang Lingkup Kabupaten

Analisis struktur pemanfaatan ruang merupakan analisis yang mengkaji mengenai kondisi pemanfaatan ruang yang terbagi dalam hierarki-hierarki yang menunjukkan fungsi dan nilai suatu kawasan dibanding dengan kawasan yang lain. Tujuan dari analisis struktur

kawasan ini adalah untuk mengetahui sistem organisasi kawasan yang akan menjadi arahan kegiatan yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan tersebut. Dalam analisis struktur pemanfaatan ruang, akan dijabarkan secara lebih mendetail dalam rencana sistem lingkungan dan analisis sistem transportasi Kota Ponorogo maupun kawasan.

Kabupaten Ponorogo menerapkan Rencana Sistem Perkotaan dan Rencana Sistem Perdesaan. Kawasan Khusus Terpadu yang direncanakan di Kecamatan Ponorogo Kelurahan Cokromenggalan merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di Perkotaan Ponorogo dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Siman, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ponorogo.

1) Analisis Sistem Lingkungan Perkotaan

Perkotaan Ponorogo merupakan pusat dari wilayah Kabupaten Ponorogo serta sebagai pusat dari pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ponorogo, meliputi: Kecamatan Siman, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ponorogo dengan kegiatan utama perdagang dan jasa, serta pendidikan. Adapun Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ponorogo adalah sebagai Pusat pemerintahan Kabupaten, Pusat pelayanan umum skala Kabupaten; Pariwisata regional; Pusat kegiatan industri; Pusat kesehatan skala kabupaten; Pendidikan tinggi; Pusat kegiatan olahraga skala Kabupaten;

Pusat kegiatan kesenian regional – nasional.

Adapun kegiatan utama pada wilayah pengembangan ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pengembangan kegiatan pelayanan umum, pmbangan kegiatan perdagangan dan jasa; pengembangan kegiatan industri; pariwisata, dan pengembangan kegiatan penunjangnya.

Analisis pada rencana sistem lingkungan perkotaan dilakukan dengan mengkaji rencana sistem lingkungan yang telah termuat dalam dokumen rencana di atasnya (dalam hal ini dokumen rencana dalam Rencana Tata Ruang Kota Ponorogo). Analisis terhadap rencana sistem lingkungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem lingkungan perkotaan yang diharapkan dapat dicapai dalam kaitannya dengan keseimbangan sistem lingkungan perkotaan dengan kawasan di sekitar Kawasan Terpadu Khusus.

2) Analisis Sistem Transportasi Kota Ponorogo dan Kawasan Khusus Terpadu

Salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengetahui struktur pemanfaatan ruang adalah sistem transportasi. Dengan menganalisis sistem jaringan transportasi yang ada maka akan diketahui fungsi-fungsi dan nilai kawasan pada suatu kota dan kawasan. Oleh sebab itu dengan menganalisis sistem transportasi di Kota Ponorogo dan Kawasan khusus

terpadu, maka akan diketahui fungsi dan nilai kawasan yang akan membantu dalam mengarahkan pengembangan kawasan melalui pengembangan aktifitas maupun rencana pengembangan jaringan transportasi yang disesuaikan dengan arahan pengembangan kawasan.

PENUTUP

Sebagai kawasan khusus terpadu dengan dominasi utama sebagai kawasan penyangga ekologi dengan ditunjang kegiatan sosial, ekonomi dan budaya, maka kawasan perencanaan mempunyai karakteristik sebagai kawasan konservasi (alam) dan rekreasi serta ekonomi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Secara konseptual kawasan khusus terpadu untuk lansekap sehingga kawasan ini mengarah sebagai hutan kota, dengan tata guna lahan: *main entrance* dan penerima 10%. Konservasi 60%, Ekonomi 10% dan Sosial budaya 20%. Sedangkan kawasan perencanaan sebagai Kawasan Khusus terpadu memiliki tema utama sebagai kawasan hutan kota penyangga ekologi. Rencana pemanfaatan ruang pada kawasan khusus terpadu meliputi kemanfaatan untuk zona *main entrance* dan penerima, zona konservasi, zona kegiatan ekonomi, dan zona kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Malik, Hemen, 2009, Pembangunan Berbasis Masyarakat: mungkinkah dapat menjawab masalah sosial? <http://wecarebengkulu.wordpress.com/2009/06/24/pembangunan->

- berbasis-masyarakat-
mungkinkah-dapat-menjawab-
masalah-sosial/
- O'Flaherty C , 1997, "Physical Methods
of Traffic Control" in O'Flaherty
C (ed)
- Pignataro, Cantilli, Edmund J. 1973,
Traffic engineering, Prentice-
Hall
- Salmani, 2012, Pembangunan
Berkelanjutan dan Implikasinya
di (Indonesia)
*salmanisaleh.files.wordpress.com/.../k
uliah-1_pembangunan-berkela...*
- Sugiharto, Toto, 2012, Ekonomi
Kerakyatan Dalam Tatanan
Ekonomi Indonesia: Peran
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
[http://www.puskopditbkcukalim
antan.org/index.php/berita-
cu/67-ekonomi-kerakyatan-
dalam-tatanan-ekonomi-
indonesia-peran-koperasi-a-
usaha-mikro-kecil-dan-meneng.](http://www.puskopditbkcukalimantan.org/index.php/berita-cu/67-ekonomi-kerakyatan-dalam-tatanan-ekonomi-indonesia-peran-koperasi-a-usaha-mikro-kecil-dan-meneng)
- Suwardjoko Warpani, 1990,
Merencanakan Sistem
Pengangkutan, Institut
Teknologi Bandung